

**Kuasa Uang vs Kedaulatan Rakyat: Studi Kuantitatif Persepsi
Mahasiswa STISA Pamekasan terhadap Politik Uang dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024**

Achmad Mudatsir R

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan

Email: achmadmudatsir@stisa.ac.id

Raharjo

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: kendal.joe21@gmail.com

Samsuri

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan

Email: samsurirafi01@gmail.com

Abstrak:

Politik uang (*money politics*) merupakan momok terbesar dalam demokrasi. Apalagi dalam konteks Indonesia yang menganut sistem pemilihan sistem pemilu proporsional terbuka (*open list*) berbasis suara terbanyak yang berkorelasi positif terhadap praktek korupsi politik. Artikel ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisa data menggunakan *Likert scale*. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil *interview* terstruktur menggunakan kuisisioner ditambah dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan ini mengungkap persepsi mahasiswa STISA Pamekasan yang secara signifikan cenderung menganggap *money politics* dapat menceraikan nilai-nilai demokrasi serta adanya penolakan penggunaan *money politics* untuk mendulang suara pada pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh kontestan pemilihan umum atau tim suksesnya.

Kata Kunci: Politik uang, demokrasi, persepsi, kuantitatif

Abstract:

Money politics is the biggest scourge in democracy. Especially in the context of Indonesia, which adheres to an open list proportional election system based on the majority vote, which is positively correlated with political corruption practices. This article uses quantitative research methods with data analysis techniques using the Likert scale. The data used is primary data in the form of structured interviews using questionnaires coupled with secondary data. The results of this study show that it reveals the perceptions of STISA Pamekasan students who significantly tend to think that money politics can divorce democratic values and the rejection of the use of money politics to gain votes in the 2024 elections carried out by election contestants or their success teams.

Keywords: Money politics, democracy, perception, quantitative

Pendahuluan

Praktik politik uang (*money politics*) dalam setiap rekrutmen politik merupakan hambatan terbesar dalam demokrasi substantif. Praktek-praktek yang mencederai proses pemilihan umum (pemilu) menjadikan pemilu hanya sebagai pentas demokrasi prosedural.¹ Termasuk juga pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ilmu sosiologi mengistilahkan politik uang ini dengan *venality*. Ignas Kleden berpendapat bahwa istilah ini merujuk pada keadaan dimana uang dipakai untuk membayar sesuatu yang menurut hakikatnya tidak bisa dibeli dengan uang.²

Dalam konteks Indonesia, politik uang (*money politics*) sangatlah mengkhawatirkan. Masyarakat cenderung menganggap praktik

¹ Ahmad Sadzali, 'Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 193-218 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>>.

² Ignaz Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, (Magelang: Indonesiaterra, 2004), 12.

money politics merupakan hal yang biasa, sehingga tidak lagi peka terhadap risiko-risiko yang akan timbul dari hal tersebut. Masyarakat menganggap lumrah tindakan ini karena mereka yakin bahwa *money politics* tidak bisa dihindari dalam kontestasi politik. Jadi semuanya tampak alami. Meskipun *money politics* kerap berlangsung di beberapa pemilihan umum, namun tidak ada penolakan.³ Data penyelenggaraan pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa praktik politik uang (*money politics*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkembangan demokrasi di negara ini. Praktik *money politics* terjadi pada semua tahapan pemilu, termasuk proses verifikasi Capres dan Cawapres, proses verifikasi partai politik oleh KPU dan KPUD, proses penghitungan hasil pemilu, dan proses rekapitulasi data hasil pemilu.⁴

Burhanuddin Muhtadi dkk menyatakan bahwa pada tahun 2019, jumlah pemilih yang terlibat *money politics* dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4% hingga 33,1%. Dalam ukuran standar internasional, kisaran *money politics* ini sangat tinggi dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia, karena secara kuantitas, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Dengan kata lain politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam Pemilu Indonesia.⁵ Selanjutnya, menurut hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan survey tentang Pemilu 2019 dan Demokrasi di Indonesia, menyatakan bahwa

³ M Roy, E E Ekoodoh, and R S Suraya, 'Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif', *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi*, 3 (2019), 81-95 <<https://core.ac.uk/download/pdf/335134368.pdf>>.

⁴ Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago, 'Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1.1 (2019), 53-61 <<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>>

⁵ Burhanuddin Muhtadi, 'Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru', *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5.1 (2019), 55-74 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>>.

terdapat 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya politik uang yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019, dan 46,7 persen menganggap politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi.⁶

Salah satu faktor paling dominan dalam tumbuhnya praktek *money politics* adalah pemilu proporsional terbuka (open list) berbasis suara terbanyak. Sistem ini menempatkan individu lebih dominan dan cenderung melahirkan liberalisme politik atau “persaingan bebas politik sebebas-bebasnya”, bahkan di internal partai sendiri. Partai tidak lagi mempunyai tugas menyeleksi kader-kadernya. Ketika sudah terpilih menjadi representasi rakyat, kader-kader partai cenderung melakukan “korupsi politik” untuk menutupi biaya politik (*political cost*) yang sudah dikeluarkan dalam proses pencalonan. Sistem pemilu ini telah melawan arus kebiasaan terhadap pilihan sistem pemilu proporsional di dunia. Kebanyakan sistem proporsional di dunia terutama di negara-negara demokrasi baru memakai varian daftar tertutup (closed list of proportional representation), artinya bahwa urutan caleg yang dipilih berdasarkan daftar urut yang ditentukan oleh parpol melalui seleksi ketat dan demokratis. Sistem ini ditujukan untuk memperkuat sistem kepartaian, terutama agar parpol dapat berperan cukup besar. Akan tetapi dalam sistem pemilu di Indonesia terdapat anomali.⁷

Segmentasi mahasiswa merupakan segmen pemilih yang layak dan menarik untuk diteliti minimal karena adanya dua hal. *Pertama*, segmen mahasiswa ini merupakan pemilih pemula yang jumlahnya merupakan segmen pemilih terbesar dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024. *Kedua*, mahasiswa diasumsikan sebagai kaum terdidik yang sudah punya seperangkat metode untuk menganalisa

⁶ Lati Praja Delmana dkk, ‘Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia’, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1.2 (2020), 1–20 <<https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>>.

⁷ Agus Riwanto, ‘Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia’, *Yustisia Jurnal Hukum*, 91.1 (2015), 89–102 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2854>>.

problematika social dan dilatih untuk memecahkannya. Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Gen Z yang akan berusia 12-27 tahun jumlahnya mencapai sekitar 75,94 juta orang atau 27,95%. Sedangkan Gen Y yang berusia 28-43 tahun mencapai sekitar 69,38 juta jiwa atau 28,87%. Kedua generasi ini merupakan kelompok pemilih muda (berusia 17-40 tahun) yang mencapai sekitar 107 juta jiwa atau sekitar 53-55% dari total pemilih, yang menurut Daftar Pemilih Sementara (DPS) jumlahnya sebanyak 205.853.518 pemilih.⁸ Uraian fakta-fakta di atas mengkonfirmasi asumsi yang dikemukakan Cornelis Lay bahwa sebenarnya *money politic* bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Secara kultural, *money politics* merupakan bagian politik Indonesia ditingkat grass-root sementara pada tingkat politik atas, ia telah menjadi metode standar politik Orde Baru dalam membangun jaringan dukungan politik yang hingga kini belum mengalami pergeseran ataupun pemudaran.⁹

Metode Penelitian

Artikel berjudul “Persepsi Mahasiswa STISA Pamekasan terhadap Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024” ini merupakan penelitian kuantitatif dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN), khususnya yang berkaitan dengan pemilihan umum. Dipilihnya segmentasi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah As-Salafiyah (STISA) Pamekasan sebagai obyek pada artikel ini guna mengungkap persepsi segmentasi yang merepresentasikan pemilih muda dalam pemilihan umum 2024.

Adapun waktu pengambilan data dari lapangan ini dibatasi dalam dua tahap. Yaitu tahap wawancara tatap muka di kampus

⁸ Primandha Sukma Nur Wardhani, ‘Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum’, *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.1 (2018), 57 <<https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>>.

⁹ Cornelis Lay, *Involusi Politik Esei-esei Transisi Indonesia*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006), 77.

STISA Pamekasan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai pada 6 Maret 2024. Sedangkan pada periode tanggal 21 Maret 2024, sehari setelah munculnya rilis resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang rekapitulasi hasil pemilihan umum di pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden, adalah interval waktu pengisian kuesioner online melalui Google Form dan berlangsung sampai 16 April 2024.

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari dua program studi Hukum Ekonomi Syri'ah (HES) dan Hukum Keluarga Islam (HKI) dari STISA Pamekasan yang merupakan sebuah kampus yang berdiri tahun 2016 di atas tradisi kepesantrenan Pondok Pesantren As-Salafiyah Sumber Duko sejak tahun 1922. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara dengan alat bantu kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi.

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁰ Untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang *money politics* dalam pemilu 2024 digunakan skala Likert. Terdapat dua bentuk pertanyaan dalam skala Likert,¹¹ yaitu bentuk pertanyaan positif untuk mengukur skala positif, dan bentuk pertanyaan negative untuk mengukur skala negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1; sedangkan bentuk pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5.¹² Dalam artikel ini pertanyaannya berkaitan dengan pernyataan berbentuk kalimat negative. Kriteria

¹⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), 39.

¹¹ Spencer E. Harpe, 'How to Analyze Likert and Other Rating Scale Data', *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 7.6 (2015), 836-50 <<https://doi.org/10.1016/j.cptl.2015.08.001>>.

¹² Viktor Handrianus Pranatawijaya and others, 'Penerapan Skala Likert Dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online', *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5.2 (2019), 128-37 <<https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185>>.

yang digunakan untuk menentukan kategori persepsi mahasiswa tersebut ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Nomor	Variabel	Bobot (Kategori)
1	Persepsi mahasiswa STISA Pamekasan terkait apakah <i>money politics</i> mencederai nilai-nilai demokrasi.	1 (Tidak setuju) 2 (Kurang Setuju) 3 (Netral) 4 (Setuju) 5 (Sangat setuju)
2	Persepsi mahasiswa Mahasiswa Pamekasan terkait apakah calon atau tim sukses tidak seharusnya menggunakan <i>money politics</i> untuk mendulang suara dalam pemilu 2024.	1 (Tidak setuju) 2 (Kurang Setuju) 3 (Netral) 4 (Setuju) 5 (Sangat setuju)

Adapun penghitungan skor Likert dalam artikel ini menggunakan rumus¹³

$$T \times P_n$$

T : Total jumlah responden yang memilih

P_n : Pilihan angka skor Likert

Index% yang digunakan untuk mengkonversi skor Likert ke dalam persentase menggunakan rumus

$$\text{Index\%} = \text{total skor} : Y \times 100$$

Di mana Y adalah nilai maksimal yang dicapai jika seluruh responden menjawab "sangat setuju". Jadi Y dalam artikel ini adalah 109x5=545.

¹³ Ankur Joshi and others, 'Likert Scale: Explored and Explained', *British Journal of Applied Science & Technology*, 7.4 (2015), 396-403 <<https://doi.org/10.9734/bjast/2015/14975>>.

Kemudian persentase skor Likert tersebut dikategorikan kembali ke dalam 5 kategori lagi yaitu pada tabel berikut:

Tabel 2
Interval dan kategori

Interval	Kategori
0% hingga 19,9%	Tidak setuju
20% hingga 39,9%	Kurang setuju
40% hingga 59,9%	Netral
60% hingga 79,9%	Setuju
80% hingga 100%	Sangat setuju

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan memilih 109 mahasiswa. Adapun jumlah populasi mahasiswa STISA Pamekasan keseluruhan adalah 220 mahasiswa. Jadi penelitian ini sudah mencakup 49,6% dari total mahasiswa STISA Pamekasan. *Purposive sampling* merupakan sebuah metode sampling non random sampling dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bias menanggapi kasus riset.¹⁴ Adapun rinciannya adalah 49 perempuan dan 60 laki-laki, 59 mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan 50 mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), 10 mahasiswa (9,2%) berumur 17 tahun, 22 mahasiswa (20,2%) berumur 18 tahun, 13 mahasiswa (11,9%) berumur 19 tahun, 19 mahasiswa (17,4%) berumur 20 tahun, 14 mahasiswa (12,8%) berumur 21 tahun, 11 mahasiswa (10,1%) berumur 22 tahun, 9 mahasiswa (8,3%) berumur 23 tahun, 5 mahasiswa (4,6%) berumur 24 tahun, 3 mahasiswa (2,8%) berumur 25 tahun, dan 3 mahasiswa (2,8%) berumur 26 tahun.

¹⁴ Ika Lenaini, 'Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling', *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6.1 (2021), 33-39 <<http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>>.

Berdasarkan formulasi sampel minimum berdasarkan metode Slovin,¹⁵ didapatkan sampel minimum dengan jumlah populasi mahasiswa STISA Pamekasan sebanyak 220 dan tingkat galat sampling (*margin of error*) sebesar 7% ialah sebesar:

$$\frac{105,07}{2} = \frac{220}{2,078} = \frac{220}{x (0,07^2) (220) + 1} = \frac{N}{Ne^2 + 1} = n$$

Besarnya sampel minimum : n

Besarnya populasi : N

Tingkat galat (*margin of error*) yang diinginkan : e

Jadi total sampel sebanyak 109 mahasiswa sudah melampaui kriteria *sampling* metode Slovin yang mensyaratkan 105,072 sampel.

Hasil dan Pembahasan

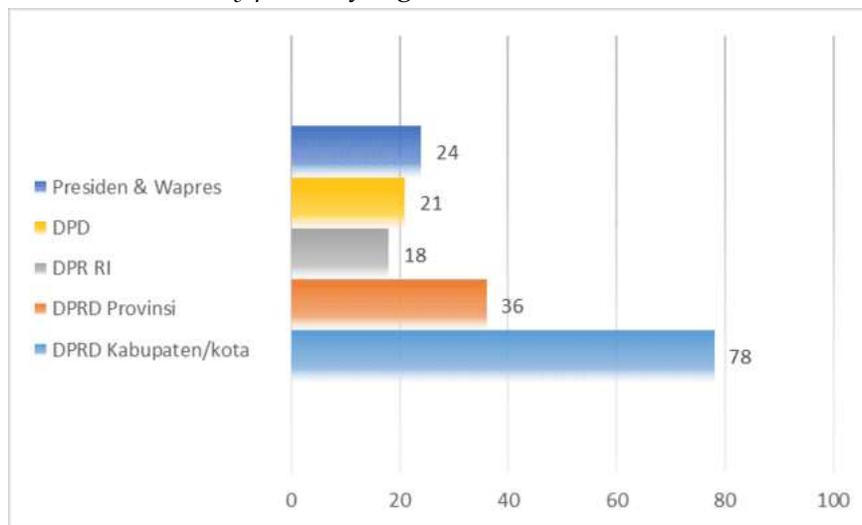
Sebelum membahas data persepsi mahasiswa tentang *money politics*, sepatutnya disajikan terlebih dahulu data mahasiswa yang melihat langsung dan meyakini adanya praktek tersebut. Data lapangan lapangan mengungkapkan bahwa sebanyak 66 mahasiswa (60,6%) melihat langsung praktek *money politics* saat pemilihan umum 2024. Sedangkan sisanya 43 mahasiswa (39,4%) mengaku tidak melihat secara langsung praktek *money politics* tersebut.

Tetapi gabungan data mahasiswa yang melihat langsung dan yang hanya meyakini ada praktek *money politics* menyebutkan bahwa seluruh mahasiswa (109 orang atau 100%) menyadari adanya praktek tersebut telah terjadi dan mereka mengetahui secara mendetail. Praktek *money politics* yang diyakini adanya oleh mahasiswa tertinggi ada pada tingkatan Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten/Kota. Sebanyak 78 mahasiswa (71%) yakin bahwa telah terjadi jual beli

¹⁵ Agung Santoso, 'Rumus Slovin: Panacea Masalah Ukuran Sampel', *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*, 4 No.2.Oktober (2023), 24-43 <<https://e-journal.usd.ac.id/index.php/suksma/article/view/6434/3637>>.

suara pada tingkat tersebut. Sisanya, terjadi di tingkatan DPRD Provinsi diyakini oleh 36 mahasiswa (33%), DPR RI 18 mahasiswa (16,5%), DPD 21 mahasiswa (19,3%), dan sisanya 22% diyakini ada oleh 24 mahasiswa dan dilakukan oleh tim sukses calon presiden dan wakil presiden.

Gambar 3
Praktek *money politics* yang diamati oleh mahasiswa STISA



Dari data di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam konteks pemilu legislatif, mahasiswa STISA Pamekasan berpandangan bahwa semakin rendah cakupan daerah pemilihan maka semakin tinggi pula frekuensi penggunaan *money politics* untuk mendulang suara.

Terkait variable pertama yang dirumuskan dengan pertanyaan sikap mahasiswa STISA Pamekasan terhadap pernyataan "*money politics* mencederai nilai-nilai demokrasi" ditemukan data sebagaimana table berikut ini:

Gambar 4
Diagram persepsi mahasiswa terkait money politics mencederai demokrasi

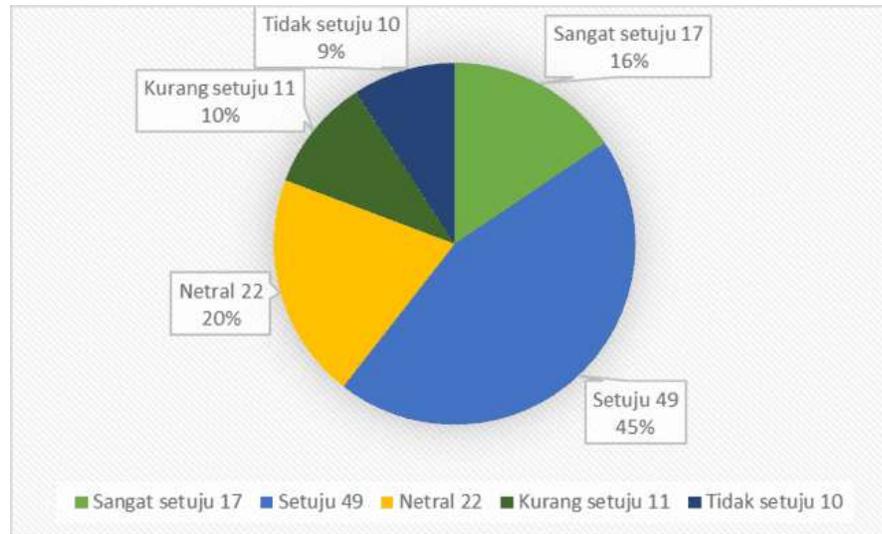


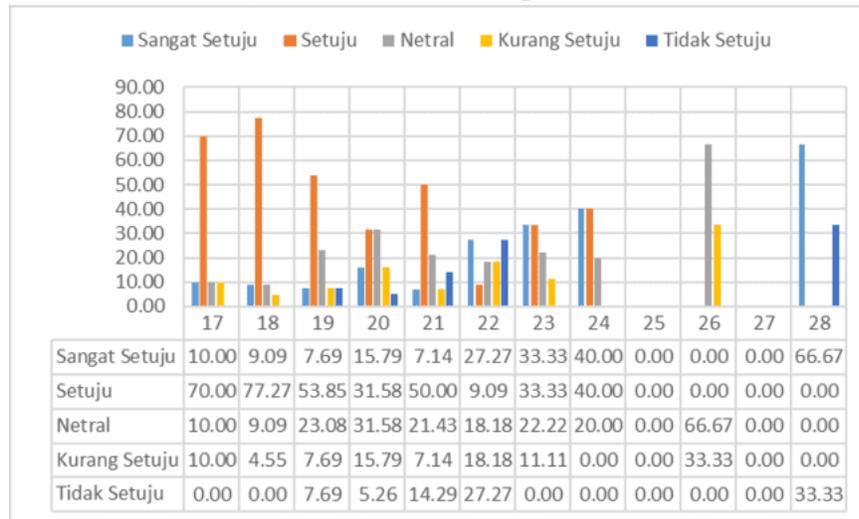
Diagram lingkaran di atas menggambarkan kekhawatiran mahasiswa STISA Pamekasan dalam penggunaan *money politics* akan mencederai nilai-nilai kedaulatan rakyat atau demokrasi. Asumsi tersebut dapat dihitung dengan mengkategorikan variabel ke dalam rumus $T \times P_n$ dalam skor Likert. Hitungannya adalah

$$(17 \times 5) + (49 \times 4) + (22 \times 3) + (11 \times 2) + (10 \times 1) = 379$$

Adapun skor tertinggi yang kemungkinan didapatkan jika keseluruhan 109 responden menjawab "sangat setuju" adalah $5 \times 109 = 545$. Sedangkan skor terendah yang didapatkan adalah jika keseluruhan responden menjawab "tidak setuju" yaitu $1 \times 109 = 109$. Sedangkan Index% yang didapat adalah $379 : 545 \times 100 = 69,542$. Jika mengacu pada Tabel 2 maka 69,542 masuk ke dalam interval kategori "setuju".

Jika diperinci lagi berdasarkan kategori umur dengan masih menggunakan variabel yang sama, didapatkan data dengan sajian data berupa persentase (*percentage*) sebagai berikut

Gambar 5
 Persentase persepsi *money politics* berdampak negatif pada demokrasi (berdasarkan usia responden).

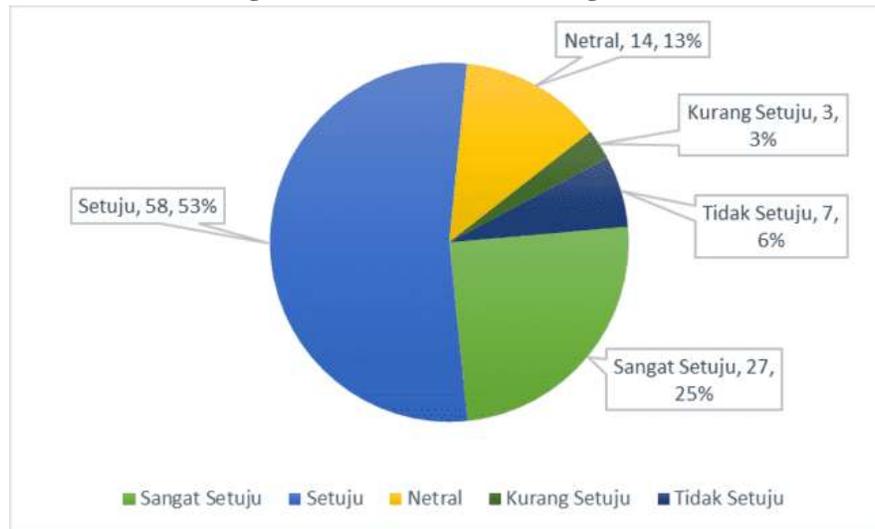


merujuk pada data di atas, mayoritas persentase pemilih pemula yang berusia 17 sampai 21 tahun cenderung mengekspresikan pendapat yang setuju bahwa praktek *money politics* berimplikasi pada cederanya nilai-nilai demokrasi. Adapun mahasiswa yang sudah berumur 22 tahun relatif lebih bervariasi dalam isu ini, bahkan cenderung sedikit menguat ke arah “tidak setuju”. Sedangkan dalam segmentasi mahasiswa yang berusia 23 dan 24 tahun ada penguatan dalam hal kesetujuan terhadap pernyataan yang diajukan, yakni dengan menguatnya suara “sangat setuju” yang ditandai dengan makin tingginya balok diagram paling kiri berwarna biru muda serta tidak adanya suara “kurang setuju” atau “tidak setuju”.

Sedangkan variable kedua yang terkait apakah calon atau tim sukses tidak seharusnya menggunakan *money politics* untuk mendulang suara dalam pemilu 2024, didapatkan data persepsi mahasiswa STISA Pamekasan adalah sebagai berikut:

Gambar 6

Diagram persepsi mahasiswa tentang seharusnya *money politics* tidak digunakan untuk mendulang suara



Data tersebut menggambarkan ketidak-setujuan yang signifikan terhadap perilaku calon dan tim sukses yang menggunakan *money politics* untuk mendulang suara.

Guna memastikan penolakan mahasiswa STISA Pamekasan terhadap *money politics* tersebut dapat dihitung seperti variabel pertama, sehingga menjadi

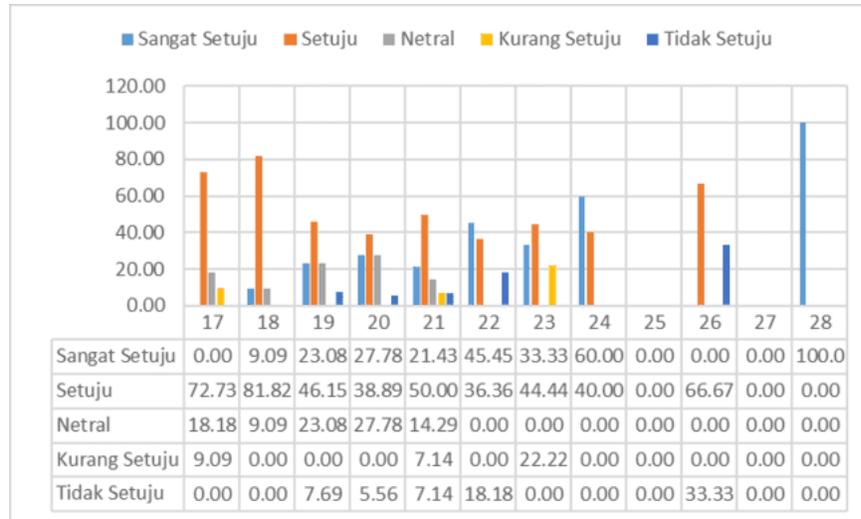
$$(27 \times 5) + (58 \times 4) + (14 \times 3) + (3 \times 2) + (7 \times 1) = 422$$

Skor tertinggi adalah $5 \times 109 = 545$. Maka Index% variabel kedua dihitung menjadi $422 : 545 \times 100 = 77,432$. Angka 77,432 dalam tabel 2 termasuk kedalam interval dengan kategori "setuju".

Variabel kedua ini jika dirinci dalam segmentasi usia akan didapatkan data sebagai berikut:

Gambar 7

Persentase persepsi mahasiswa berdasarkan umur tentang pernyataan seharusnya *money politics* tidak digunakan sebagai alat pendulang suara



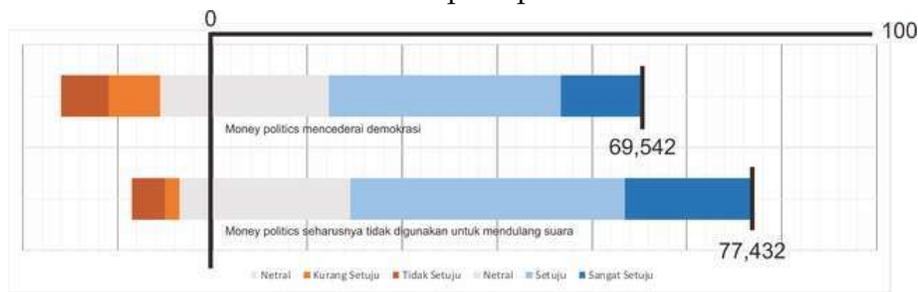
Persentase tertinggi sebagai respon terhadap pernyataan pada variabel kedua terdapat di segmen mahasiswa yang sudah bukan pemilih pemula, yaitu segmen usia 28 tahun. Adapun segmen mahasiswa yang merupakan pemilih pemula (usia 17 sampai 21 tahun) mayoritas memberikan persepsi yang sama dengan catatan minor masih adanya yang memberi respon “kurang setuju” dan “tidak setuju” meskipun kisaran maksimalnya adalah 14,28 persen, yaitu pada mahasiswa yang berusia 21 tahun. Adapun segmen mahasiswa yang sudah bukan pemilih pemula (di atas 21 tahun) angka tertinggi “tidak setuju” terdapat pada segmen mahasiswa yang berusia 26 tahun, yaitu 33,33 persen.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas dapat ditarik dua kesimpulan berkenaan dengan persepsi mahasiswa STISA Pamekasan terkait *money politics*. Pertama, mahasiswa STISA Pamekasan mempunyai persepsi setuju terhadap pernyataan bahwa *money politics* mencederai nilai-nilai kedaulatan rakyat (demokrasi) dengan skala angka yang signifikan, yaitu 69,542. Kedua, mahasiswa STISA Pamekasan cenderung menganggap sebaiknya kontestan dan tim

suksesnya yang berkompetisi dalam pemilihan umum tahun 2024 menghindari *money politics* sebagai alat pendulang suara. Persepsi kedua ini ditunjukkan dengan skala yang lebih tinggi daripada skala persepsi yang pertama, yaitu 77,432. Kedua skala tersebut dapat dilihat pada gambar 8 di bawah ini:

Gambar 8
Skala persepsi



Saran dan Rekomendasi

Pertama, meskipun skala angka yang didapatkan pada dua persepsi di atas sangat meyakinkan (69,542 dan 77,432) akan tetapi sebagai kampus yang berakar pada tradisi pesantren, STISA Pamekasan harus mampu meramu kurikulum anti-korupsi dalam mata kuliah yang berkenaan dengan Islam dan tata negara, khususnya mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan mata kuliah yang bermuatan keislaman. Kedua, para *stakeholders* seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian harus berkolaborasi dengan kampus-kampus dalam memaksimalkan kampanye anti korupsi, termasuk bermitra dengan STISA Pamekasan.

Daftar Pustaka

Agus Riwanto, 'Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 91.1 (2015), 89-102

<<https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1i0.2854>>

Cornelis Lay, *Involusi Politik Esei-esei Transisi Indonesia*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006

Fitriani, Lina Ulfa, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago, 'Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1.1 (2019), 53-61
<<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>>

Harpe, Spencer E., 'How to Analyze Likert and Other Rating Scale Data', *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 7.6 (2015), 836-50 <<https://doi.org/10.1016/j.cptl.2015.08.001>>

Ignaz Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Magelang: Indonesiatara, 2004.

Joshi, Ankur, Saket Kale, Satish Chandel, and D. Pal, 'Likert Scale: Explored and Explained', *British Journal of Applied Science & Technology*, 7.4 (2015), 396-403
<<https://doi.org/10.9734/bjast/2015/14975>>

Lati Praja Delmana dkk, 'Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia', *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1.2 (2020), 1-20
<<https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>>

Lenaini, Ika, 'Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling', *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6.1 (2021), 33-39
<<http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>>

Muhtadi, Burhanuddin, 'Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru', *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5.1 (2019), 55-74 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>>

- Nur Wardhani, Primandha Sukma, 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum', *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.1 (2018), 57 <<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>>
- Pranatawijaya, Viktor Handrianus, Widiatry Widiatry, Ressa Priskila, and Putu Bagus Adidyana Anugrah Putra, 'Penerapan Skala Likert Dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online', *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5.2 (2019), 128-37 <<https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185>>
- Roy, M, E E Ekoodoh, and R S Suraya, 'Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif', *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi*, 3 (2019), 81-95 <<https://core.ac.uk/download/pdf/335134368.pdf>>
- Sadzali, Ahmad, 'Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 193-218 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>>
- Santoso, Agung, 'Rumus Slovin: Panacea Masalah Ukuran Sampel', *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*, 4 No.2.Oktober (2023), 24-43 <<https://e-journal.usd.ac.id/index.php/suksma/article/view/6434/3637>>
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014. Agus Riwanto, 'Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 91.1 (2015), 89-102 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2854>>
- Cornelis Lay, *Involusi Politik Esei-esei Transisi Indonesia*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006
- Fitriani, Lina Ulfa, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago, 'Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon

- Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1.1 (2019), 53-61 <<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>>
- Harpe, Spencer E., 'How to Analyze Likert and Other Rating Scale Data', *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 7.6 (2015), 836-50 <<https://doi.org/10.1016/j.cptl.2015.08.001>>
- Ignaz Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Magelang: Indonesiatara, 2004.
- Joshi, Ankur, Saket Kale, Satish Chandel, and D. Pal, 'Likert Scale: Explored and Explained', *British Journal of Applied Science & Technology*, 7.4 (2015), 396-403 <<https://doi.org/10.9734/bjast/2015/14975>>
- Lati Praja Delmana dkk, 'Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia', *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1.2 (2020), 1-20 <<https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>>
- Lenaini, Ika, 'Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling', *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6.1 (2021), 33-39 <<http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>>
- Muhtadi, Burhanuddin, 'Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru', *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5.1 (2019), 55-74 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>>
- Nur Wardhani, Primandha Sukma, 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum', *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.1 (2018), 57 <<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>>
- Pranatawijaya, Viktor Handrianus, Widiatry Widiatry, Ressa Priskila, and Putu Bagus Adidyana Anugrah Putra, 'Penerapan Skala Likert Dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online', *Jurnal Sains*

Achmad Mudatsir R, Raharjo, Samsuri

Dan *Informatika*, 5.2 (2019), 128-37
<<https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185>>

Roy, M, E E Ekoodoh, and R S Suraya, 'Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif', *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi*, 3 (2019), 81-95
<<https://core.ac.uk/download/pdf/335134368.pdf>>

Sadzali, Ahmad, 'Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 193-218 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>>

Santoso, Agung, 'Rumus Slovin: Panacea Masalah Ukuran Sampel', *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*, 4 No.2.Oktober (2023), 24-43 <<https://e-journal.usd.ac.id/index.php/suksma/article/view/6434/3637>>

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.